

Peningkatan dan Standarisasi Mutu Pendidikan

Tinjauan atas UU, Kurikulum dan Kemampuan Guru

Oleh Muzhoffar Akhwan

Dosen FIAI UII Yogyakarta

Abstract

The paradigm of education in future is democracy. In Indonesia after the Era of Reformation there were big changes in the policy of education, for example school based management and competency based curriculum since 2001. Therefore to develop the curriculum it is must to do reformation and reorientation to the system of education. Thus, efforts to strengthen the capability of those teachers to become professional educators were unavoidable. Because, the role of teachers in establishing new generation and civilization in the midst of global changes are very significant. Change the curriculum of education from centralistic to decentralization and change the curriculum of education from theoretic oriented to problem oriented; how the teacher deliver subject of teaching from the real problem faced by students with constructivist approach.

Keywords:

curriculum, competency, profession.

Pendahuluan

Kualitas kehidupan bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidikan. Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, damai, terbuka, dan

demokratis. Melalui penataan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman yang berorientasi kepada peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu solusi untuk menaikkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam menjawab tantangan globalisasi dewasa ini. Salah satu indikator mutu pendidikan ditentukan oleh kualitas gurunya. Bila guru selalu kreatif dan meningkatkan kualitas pembelajarannya, maka akan melahirkan anak bangsa yang berkualitas pula.

Kondisi sumber daya manusia kita saat ini sangat tidak kompetitif. Menurut catatan *Human Development Report* Tahun 2003 versi UNDP, sebagaimana dikutip Nurhadi (2003 : 1), peringkat kualitas sumber daya manusia Indonesia berada di urutan 112. Indonesia berada jauh di bawah Filipina (85), Thailand (74), Malaysia (58), Brunei Darussalam (31), Korea Selatan (30), dan Singapura (28). Bahkan *International Educational Achievement* (IEA) melaporkan bahwa kemampuan membaca siswa SD Indonesia berada di urutan 38 dari 39 negara yang disurvei. Sementara itu, *Third Mathematics and Science Study* (TIMSS) melaporkan bahwa kemampuan matematika siswa SMP kita berada di urutan ke 34 dari 38 negara, sedangkan kemampuan IPA berada di urutan ke 32. Jadi, keadaan

pendidikan kita memang memperhatikan.

Berdasarkan hasil pemikiran yang panjang, akhirnya ditemukan bahwa arah pendidikan Indonesia kurang tepat, sehingga menyebabkan kualitas lulusannya kurang berkualitas jika dibandingkan dengan lulusan pendidikan di negar-negara lain. Pendidikan di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi lebih diarahkan untuk menguasai materi sebanyak-banyaknya (*content based*) daripada untuk mencapai kompetensi tertentu. Akibatnya adalah sumber daya manusia Indonesia berasal dari lulusan lembaga pendidikan kurang berkualitas dan karena itu, pembaharuan pendidikan dimulai dari perbaikan kurikulumnya.

Tuntutan reformasi tahun 1998 yang amat penting adalah demokratisasi. Hal ini dapat dicermati dalam dua segi yaitu pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (otonomi daerah). Dengan demikian peranan pemerintah pusat yang bersifat sentralistis yang berlangsung selama 50 tahun lebih akan diperkecil dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang lebih dikenal dengan sistem desentralisasi (Arifin: 2003: 1-2). Kewenangan yang dilimpahkan ke pemerintah daerah tersebut menuntut prasyarat, yaitu tersedianya sumber daya manusia yang mampu menerjemahkan dan melaksanakan tuntutan gerakan reformasi tersebut.

Tulisan ini akan membahas persoalan upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, terutama melalui perubahan kurikulum

berbasis kompetensi atau juga dikenal dengan istilah Kurikulum 2004. Persoalan apakah yang menjadi kendala dalam perubahan pendidikan sehingga dapat diberikan solusi yang tepat dalam implementasi pembaharuan pendidikan tersebut.

Persoalan Pendidikan

Upaya peningkatan kualitas pendidikan terus-menerus oleh berbagai elemen pendidikan. Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional telah menandatangani "Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan" pada tanggal 2 Mei 2002 yang lalu. Upaya ini dilakukan untuk merespon kebijakan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah yang berimplikasi pada otonomi pendidikan. Salah satu alternatifnya adalah dengan menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan berkehendak. Kebiasaan berpikir dan berkehendak secara konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu. Dengan pengertian tersebut maka kurikulum berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai model kurikulum yang dirancang secara khusus untuk mempersiapkan peserta didik kompeten dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Menurut Djemari Mardapi (2003), ada dua pertimbangan perlunya menerapkan kurikulum berbasis

kompetensi. *Pertama*, persaingan yang terjadi di era global terletak pada kemampuan sumber daya manusia hasil lembaga pendidikan. *Kedua*, standar kompetensi yang jelas akan memudahkan lembaga pendidikan dalam mengembangkan sistem penilaian. Berdasarkan atas dua pertimbangan tersebut, sesungguhnya penerapan kurikulum berbasis kompetensi bukan semata-mata sebagai upaya perbaikan terhadap kurikulum sebelumnya, melainkan lebih disebabkan oleh situasi dan kebutuhan masyarakat yang menuntut tersedianya sumber daya manusia yang unggul di berbagai kehidupan nyata.

Karakteristik Kurikulum berbasis kompetensi adalah sebagai berikut: (a) Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individu maupun secara klasikal; (b) Berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman; (c) Penyampaian materi dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi; (d) Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif, dan (e) Penilaian menekankan proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi (Mulyasa, 2003: 42).

Peningkatan Mutu Pendidikan

Bila dicermati, peningkatan mutu pendidikan nasional sesungguhnya dilakukan melalui perbaikan tiga isu utama, yaitu pembaharuan kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran, dan efektifitas metode pembelajaran. Kurikulum pendidikan harus

komprehensif dan responsif terhadap dinamika sosial, relevan, tidak *overload* dan mampu mengakomodasikan keberagaman keperluan dan kemajuan teknologi. Secara mikro, harus ditemukan strategi pembelajarannya yang lebih efektif di kelas dan lebih memberdayakan potensi peserta didik.

Menurut Ace Suryadi (2004) diperlukan tiga pendekatan untuk pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan yang kini menjadi fokus perhatian pemerintah dan para ahli pendidikan di Indonesia, yaitu substansi pendidikan, teknis pendidikan, dan pengelolaan pendidikan. Ketiga pendekatan untuk peningkatan mutu pendidikan tersebut sebagai berikut:

Pertama, pendekatan substansi pendidikan (*content approach*), mutu pendidikan ditentukan oleh terjadinya perubahan tingkah laku yang perlu dicapai peserta didik. Pembelajaran selama ini mengarah pada penguasaan hafalan konsep dan teori yang bersifat abstrak telah terbukti kurang menarik minat peserta didik untuk belajar sehingga prestasi belajarnya pun rendah. Akibatnya, kegiatan belajar yang seharusnya berorientasi pada peserta didik terkalahkan oleh kegiatan mengajar yang didominasi oleh guru yang cenderung kaku dan membosankan.

Isi kurikulum (*core curriculum content*) yang berorientasi pada proses pembelajaran, pada intinya terdiri dari dua kategori. Di samping isi kurikulum berkaitan dengan kemampuan dasar untuk belajar (*basic learning skills*) seperti kemampuan membaca (menyerap informasi melalui bahan bacaan secara cepat), berhitung (berlatih

dari kurikulum hasil belajar setiap bidang studi (dulu disebut GBPP). Silabus merupakan pemetaan kompetensi dasar dan pengurutannya sesuai dengan keinginan guru atau sekelompok guru. Penyusunan silabus menjadi kewenangan daerah atau sekolah. Perumusan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu; standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, alokasi waktu, dan sumber bahan. Sedangkan Rencana Pembelajaran adalah program yang disusun oleh guru untuk satu atau dua pertemuan untuk mencapai target satu kompetensi dasar yang diturunkan dari silabus. Rencana pembelajaran berisi gambaran tentang kompetensi dasar yang akan dicapai, indikator, materi pokok, skenario pembelajaran tahap demi tahap, dan penilaiannya.

Tahap kedua implementasi. Implementasi merupakan proses pelaksanaan kurikulum yang tertulis atau rencana tertulis. Proses ini sangat menentukan, mengingat sistem persekolahan lebih menekankan dimensi proses dari pada hanya sekedar hasil. Keterlibatan guru dalam mengawal proses implementasi kurikulum ini sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dipilih haruslah sejalan dengan karakter kurikulum berbasis kompetensi, yaitu: pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang mencerminkan penguasaan suatu kompetensi yang dituntut oleh kurikulum.

Mengingat belajar adalah proses bagi peserta didik dalam mengembangkan gagasan atau pemahaman

sendiri, seperti yang terkandung dalam prinsip-prinsip konstruktivisme: (1) pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif, (2) tekanan dalam proses belajar terletak pada siswa, (3) mengajar adalah membantu siswa belajar, (4) tekanan dalam proses belajar lebih pada proses bukan pada hasil akhir, (5) kurikulum menekankan partisipasi siswa, dan (6) guru adalah fasilitator (Paul Suparno, 1997: 73). Kegiatan belajar mengajar hendaknya memberikan kesempatan kepada peserta didik secara baik dan termotivasi. Suasana belajar yang diciptakan guru perlu melibatkan peserta didik secara aktif; membantu dan menghargai kinerjanya walaupun hasilnya belum memuaskan serta mengajak mereka berpikir dan berbuat agar menjadi pelajar sepanjang hayat (*life long education*).

Tahap ketiga evaluasi. Penerapan kurikulum berbasis kompetensi pada setiap jenjang pendidikan akan mempengaruhi sistem evaluasinya. Evaluasi yang digunakan haruslah yang mampu mengungkap kompetensi hasil belajar yang diterjemahkan dalam indikator. Oleh sebab itu evaluasi performansi yang mencermati kinerja peserta didik dalam proses belajar menjadi andalan. Kelebihan evaluasi performansi adalah dimungkinkan evaluator memperoleh deskripsi yang sebenarnya tentang seperangkat kompetensi dasar yang telah dikuasai peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.

Perubahan kurikulum menuntut guru mengetahui, memahami, mengaplikasikan dan mendemonstrasikan pengalaman perubahan proses pembelajaran dan sistem penilaiannya yang mensyaratkan

Perbandingan antara kurikulum konvensional dengan KBK

Kurikulum Konvensional	Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
Berbasis isi	Berbasis kompetensi
Berbasis waktu	Berbasis kinerja
Kecepatan kelompok	Kecepatan individu
Umpan balik tertunda	Umpan balik seketika
Berbasis text book	Berbasis bahan ajar yang multimedia
Orientasi mata pelajaran	Orientasi moduler
Berbasis ruang kelas	Berbasis lapangan
Guru	Fasilitator/nara sumber
Tujuan umum	Tujuan spesifik
Kriteria subjektif	Kriteria objektif

dapat mencapai kompetensi yang diinginkan. Untuk itu perlu diketahui perbedaan kurikulum berbasis kompetensi dengan kurikulum konvensional agar dapat membantu pemahaman terhadap kurikulum yang dibandingkan.

Mencermati perbandingan di atas, terlihat adanya perubahan dalam beberapa hal, baik perubahan filosofi, tujuan, materi, kualifikasi guru, strategi pembelajaran, dan kesiapan peserta didiknya.

Untuk menjalani perubahan itu, diperlukan kesadaran dari semua pihak yang terkait, karena ini menyangkut sikap mental yang selama ini dipahami bahwa mengajar adalah memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik, guru merupakan satu-satunya sumber belajar, kebenaran mutlak ada ditangan guru. Dalam hal ini, walaupun guru tidak lagi merupakan satu-satunya sumber belajar, namun ia sebagai penyanggah profesi memiliki tanggungjawab

langsung terhadap kemajuan belajar peserta didik. Guru diharapkan mampu mengembangkan silabus yang sesuai dengan kompetensi yang diajarkannya secara mandiri. Di samping hal tersebut guru dianggap lebih mengenal karakteristik peserta didik dan kondisi sekolah serta lingkungannya.

Sekolah dengan fasilitas yang lengkap dan modern, tetap saja tidak akan dapat mencapai hasil secara optimal tanpa disertai tenaga kependidikan yang ada mampu memfungsikan berbagai sarana yang tersedia. Sebaiknya, sekolah dengan media dan lingkungan yang ada dapat mengembangkan kreativitas guru untuk mencapai kualitas yang tanpa batas. Pernyataan bahwa *al-thariqatu ahammu min al-maddah*, kalau dicermati sebenarnya *al-thariqah* (metode) itu berada di bawah kendali guru sebagai pendidik. Dalam hal ini, guru tetap menjadi penentu keberhasilan peserta didik.

KBK sebagai Solusi

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), merupakan konsep yang menawarkan otonomi pada lembaga pendidikan untuk menentukan kebijakan lembaga dalam rangka meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan yang dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah dengan masyarakat. Kurikulum berbasis kompetensi dikembangkan untuk memberikan keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakpastian, dan kerumitan-kerumitan dalam kehidupan. Lulusan sekolah yang diinginkan adalah yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya bangsanya (Boediono, 2002: 1).

Pengertian kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, maka kurikulum berbasis kompetensi menghendaki ketercapaian kompetensi tertentu bagi lulusan pendidikan atau sekolah yang menggambarkan profil yang utuh, *measurable*, dan *observable*. Hal ini berbeda dengan konsep pendidikan sebelumnya yang lebih menekankan pada penguasaan materi yang cenderung pada tingkat hafalan, dan kurang terlatih menghadapi persoalan dalam berbagai situasi.

Sedangkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi menurut Anik Ghufron (2004) memiliki tiga tahap, yaitu merancang, mengimplementasikan, dan meng-

evaluasi. Setelah standar kompetensi ditentukan dan dirumuskan, maka langkah kegiatan berikutnya adalah mendesain kurikulumnya dalam bentuk silabus, mengimplementasikannya dalam bentuk kegiatan pembelajaran, dan diakhiri dengan melakukan evaluasi.

Perumusan standar kompetensi perlu melibatkan masyarakat pengguna lulusan untuk menentukan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan masyarakat, kemudian dilakukan identifikasi dan dirumuskan seperangkat kompetensi lulusan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik lembaga pendidikan itu sendiri. Konsep kompetensi dalam kurikulum meliputi empat aspek: (1) kompetensi berkenaan dengan kemampuan peserta didik melakukan sesuatu dalam berbagai konteks; (2) kompetensi menjelaskan pengalaman belajar yang dilalui siswa untuk menandai kompeten; (3) kompeten merupakan hasil belajar, mengenai hal-hal yang dapat dilakukan peserta didik melalui proses pembelajaran, dan (4) kehandalan kemampuan peserta didik melakukan sesuatu didefinisikan secara jelas, terstandar yang dapat diukur.

Standar kompetensi yang telah dirumuskan tersebut merupakan titik tolak bagi pengembangan tahap-tahap berikutnya. Tahap-tahap yang perlu dikembangkan adalah:

Tahap pertama perencanaan. Ini merupakan proses pengembangan silabus yang merupakan pedoman tertulis penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan dalam pengembangan silabus diturunkan

untuk memahami logika, angka dan ruang), menulis (menuangkan gagasan melalui tulisan atau lisan), mendengar dan menyimak (menyerap informasi melalui pengamatan dan pendengaran), serta mengenal permasalahan lingkungan agar berlatih untuk memecahkan.

Isi kurikulum juga terkait dengan substansi belajar (*basic learning contents*) seperti pengetahuan, wawasan, nilai, sikap dan keterampilan. Informasi yang diperoleh peserta didik melalui membaca buku, mendengarkan berita serta pengamatan masalah sosial selanjutnya ditelaah (*reviewed*) dan dijelaskan dengan konsep ilmu pengetahuan bersama guru dalam diskusi di kelas. Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran.

Pendekatan teknis kependidikan (*technical approach*); mutu pendidikan dapat ditingkatkan melalui pendekatan belajar tuntas (*mastery learning*). Pendekatan ini menyaratkan peserta didik untuk dapat belajar pada setiap tahapan hingga tahap penguasaan yang lebih tinggi. Untuk mengetahui tingkat suatu penguasaan tahapan belajar, perlu diterapkan sistem ujian yang obyektif dan terpercaya. Kontrol mutu pendidikan harus dilakukan secara teratur oleh lembaga *independent* serta memiliki kewenangan untuk menetapkan berbagai standar mutu secara nasional. Hasil pengukuran mutu tersebut dijadikan sebagai masukan untuk penyempurnaan substansi dan proses pendidikan

di masa yang akan datang.

Kedua, pendekatan pengelolaan pendidikan (*managerial approach*); mutu pendidikan ditingkatkan melalui penguatan setiap satuan lembaga pendidikan dalam menerapkan strategi khusus secara sendiri-sendiri. Melalui manajemen berbasis sekolah (*school based management*), misalnya pimpinan sekolah diberi tanggung-jawab sepenuhnya untuk meneliti dan mengkaji semua permasalahan mengenai alokasi dan pendayagunaan sumber daya pendidikan secara optimal yang dapat menghambat proses dan prestasi belajar. Setelah memahami permasalahan, pimpinan sekolah diberikan keleluasaan untuk memutuskan apa yang terbaik bagi sekolahnya untuk meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan serta meningkatkan prestasi belajar. Berdasarkan mutu yang telah dicapainya itu mereka berhak mendapatkan pujian (*reward*) atau hukuman (*punishment*) yang objektif dan konsisten terhadap pimpinan sekolah.

Dengan tanpa mengabaikan faktor-faktor penting lainnya, kualitas guru telah ditemukan oleh berbagai studi sebagai salah satu faktor penting dalam menentukan mutu pendidikan secara konsisten. Kewajiban pendidik (dosen), sebagaimana diamanatkan oleh UUSPN No. 20 Tahun 2003, Pasal 40 (2): (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis; (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Oleh karena itu, kesadaran guru akan perubahan paradigma pendidikan dewasa ini hendaknya disikapi dengan mencari strategi yang tepat dalam pembelajaran agar peserta didik memiliki pengalaman belajar yang dapat menjadikan peserta didik sebagai seorang yang kompeten di bidangnya. Dengan demikian, yang utama harus dibenahi adalah kepribadian guru. Karena *syakhshiyat al-mudarris ahammu min al-thariqah*, kepribadian guru lebih penting dari pada metode, guru adalah model atau sentral identifikasi diri dan konsultan bagi peserta didik yang selaras dengan ajaran dan nilai-nilai Ilahi.

Motivasi merupakan faktor penentu pencapaian prestasi belajar. Ada dua pembangkit motivasi belajar yang efektif, yaitu rasa ingin tahu dan keyakinan akan kemampuan diri. Untuk menyalurkan rasa ingin tahu peserta didik, guru dapat melakukan berbagai cara antara lain: mengajukan pertanyaan yang di luar kebiasaan atau yang menantang. Keyakinan akan kemampuan diri dapat ditumbuhkan dengan cara memberikan tugas yang dapat diselesaikan peserta didik, kalau perlu guru memberi penguatan bahwa peserta didik pasti bisa. Kemampuan guru memotivasi peserta didik agar berprestasi sangat dipengaruhi oleh kepribadian guru yang berdedikasi tinggi sebagai fasilitator dan memberikan kemudahan dan bukan berfungsi sebagai penghambat pengalaman belajar.

Untuk menjamin mutu pendidikan di Indonesia, juga diperlukan akreditasi dan sertifikasi oleh Badan Akreditasi Sekolah yang dimulai tahun 2004/2005 pada sekolah-sekolah terpilih, yang bertujuan untuk menilai

kelayakan dan kinerja program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, baik dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dengan pendidikan bermutu diharapkan lulusan dapat dengan cepat diserap oleh dunia kerja. Rambu-rambu dan ketentuan mengenai akreditasi telah diakomodasi secara baik dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 60 ayat (1), (2) dan (3), sehingga semua pihak, terutama penyelenggara pendidikan dapat mengetahui posisi satuan pendidikannya secara transparan.

Peringkat akreditasi dapat dipakai sebagai salah satu dasar pemilihan sekolah bagi calon siswa. Pada saat ini calon siswa dan orangtua dalam memilih sekolah di dasarkan atas peringkat yang dibuat oleh masyarakat sendiri, sehingga kemungkinan kesalahannya besar. Bahkan kecenderungan orangtua yang mampu dalam memilih sekolah mencari yang termahal pembeayaannya, karena asumsi yang dibangun adalah bahwa sekolah mahal pasti bermutu. Padahal kenyataannya tidaklah demikian, tapi jaminan mutu terimplementasi secara baik dalam proses pembelajaran dan hasil pendidikan yang dapat dicapai.

Kesimpulan

1. Kesadaran akan pentingnya perubahan pendidikan menuntut keharusan perubahan kurikulum yang berimplikasi pada pengembangan sumber daya manusia dan sarana belajar, dan yang

- aspek yang paling utama adalah kesiapan dan profesionalisme guru menjadi tuntutan untuk dipenuhi. Tanpa dimulai dari pemberdayaan guru, nampaknya pelaksanaan yang baik seperti kurikulum berbasis kompetensi yang dicanangkan dan menjadi tuntutan global, akan menjadi tidak berarti. Penyelesaian kendala yang bersumber dari guru, menjadi variabel penentu keberhasilan implementasi kurikulum berbasis kompetensi.
2. Kurikulum berbasis kompetensi sebagai jawaban terhadap mutu pendidikan yang tidak mampu menjawab tuntutan global, sehingga perlu dirumuskan kompetensi yang relevan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan yang berfungsi untuk mengarahkan tujuan pembelajaran.
 3. Terserapnya lulusan lembaga pendidikan oleh dunia kerja merupakan salah satu indikator keberhasilan pendidikan, sekaligus mengindikasikan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan tersebut
 4. Untuk menjamin mutu pendidikan diperlukan standar mutu yang dikendalikan oleh pemerintah maupun masyarakat berupa akreditasi program dan satuan pendidikan formal dan non formal, agar tidak terjadi malpraktik pendidikan yang dapat merugikan masyarakat.***

Kepustakaan

Ace Suryadi, 2004. *Refleksi UUSPN dan Prospeknya dalam*

Meningkatkan Kualitas Pendidikan Nasional, Makalah Dialog Interaktif Nasional. Yogyakarta: LPM-UNY.

Anik Ghufron, 2004, *Konsep Dasar Pengembangan KBK di Perguruan Tinggi*, Makalah Semiloka Kurikulum Berbasis Kompetensi oleh Kopertais Wil. III DIY.

Anwar Arifin, 2003, *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang Undang SISDIKNAS*, Jakarta, Departemen Agama RI.

Bobbi DePorter dan Mike Hernachi, 1999. *Quantum Learning, Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*, terjemahan Alwiyah Abdurrahman, Bandung: Penerbit Kaifa.

Boediono, 2002, *Pealaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta, Balitbang Depdiknas.

Departemen Pendidikan Nasional RI, 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Depdiknas: Jakarta.

Djemari Mardapi, 2003, "Kerangka Dasar Pengembangan Kurikulum Berbasis kompetensi", Makalah disampaikan pada Semiloka pengembangan model pembelajaran berbasis kompetensi bagi dosen UNY, tanggal 29 dan 30 September 2003, Yogyakarta, UNY.

- M. Jamrani Latief, "Profil Guru Agama dalam Konteks Kurikulum Berbasis Kompetensi", *Jurnal Pemikiran, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam*, Vol 1, Nomor 1, Februari-Juli 2003, Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah IAIN.
- Mulyasa, 2003, *Kurikulum Berbasis kompetensi, Karakteristik dan Implementasi*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi, dkk, 2003. *Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK*, Malang: Univ. Negeri Malang.
- Paul Suparno, 1997. *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Sudarman Danim, 2003. *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilaar, 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Zamroni, 2001, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, Yogyakarta, BIGRAF Publishing